

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian dalam tesis ini adalah Kabupaten Pringsewu, dengan Ibukota Pringsewu. Keberadaan administratif Kabupaten Pringsewu ini dikukuhkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung Tanggal 26 November 2008. Untuk mengetahui lebih jelas nama-nama kecamatan dalam Kabupaten Pringsewu berikut luas wilayah dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Luas Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Pringsewu

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase (%)
1.	Pardasuka	Pardasuka	9.474	15,16
2.	Ambarawa	Ambarawa	3.099	4,96
3.	Pagelaran	Pagelaran	17.275	27,64
4.	Pringsewu	Pringsewu	5.329	8,53
5.	Gadingrejo	Gadingrejo	8.571	13,71
6.	Sukoharjo	Sukoharjo	7.295	11,67
7.	Banyumas	Banyumas	3.985	6,37
8.	Adiluwih	Adiluwih	7.482	11,97
Jumlah			62.510	100

Sumber : Kabupaten Pringsewu Dalam Angka, Tahun 2010

B. Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu

Peninjauan kebijakan tata ruang wilayah Provinsi Lampung dan tata ruang Kabupaten Pringsewu perlu dilakukan untuk melihat keselarasannya. Terutama yang berkaitan dengan pembagian hirarki fungsional, struktur jaringan jalan, dan pengembangan sarana transportasi darat.

1. Tinjauan Rencana Pusat Kegiatan

Arahan pengembangan pusat kegiatan dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat permukiman baik pusat permukiman perkotaan maupun perdesaan untuk melayani kegiatan ekonomi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan jasa, bagi kawasan permukiman maupun daerah sekitarnya. Pusat-pusat kegiatan ditujukan untuk melayani perkembangan berbagai usaha atau kegiatan dan permukiman masyarakat dalam wilayahnya dan wilayah sekitarnya. Pengembangan pusat-pusat kegiatan dilakukan secara selaras, saling memperkuat dan serasi dalam ruang wilayah provinsi. Pengembangan pusat - pusat kegiatan diserasikan dengan sistem permukiman, jaringan prasarana dan sarana, serta peruntukan ruang lain yang berada di dalam kawasan budidaya wilayah sekitarnya, yang ada maupun yang direncanakan, sehingga pengembangannya dapat meningkatkan mutu pemanfaatan ruang yang ada.

Sistem pusat-pusat kegiatan atau sistem permukiman tidak bisa dilepaskan dari tata ruang yang ada, karena permukiman merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur tata ruang.

Sementara itu penataan ruang sendiri pada dasarnya mengarahkan sistem permukiman.

Hirarki fungsional wilayah Provinsi Lampung yang bersifat vertikal dalam 4 (empat) ordinasasi pusat pelayanan, yaitu:

- a. **Pusat Kegiatan Nasional (PKN)**, yaitu pusat yang melayani wilayah Provinsi Lampung dan / atau wilayah sekitarnya di Sumatera Bagian Selatan, Nasional, maupun Internasional. Pusat pelayanan ini terletak di Kota Bandar Lampung.
- b. **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**, yaitu pusat yang melayani satu atau lebih Kabupaten/Kota. Pusat tersebut dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya.
- c. **Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)**, yaitu pusat kegiatan lokal yang di promosikan atau di rekomendasikan oleh provinsi dalam lima tahun kedepan akan menjadi PKW, mengingat secara fungsi dan perannya kota tersebut telah memiliki karakteristik pusat kegiatan wilayah
- d. **Pusat Kegiatan Lokal**, yaitu kota-kota mandiri selain pusat primer dan sekunder yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien.

Sistem pusat kegiatan di dalam wilayah provinsi harus mengadopsi kebijakan pengembangan sistem kegiatan nasional yang dituangkan

dalam RTRWN maupun RTRW Pulau. Kota/kawasan perkotaan sebagai PKN, PKSN, dan PKW ditetapkan oleh Pemerintah yang kebijakannya dituangkan dalam RTRWN. Sedangkan kebijakan untuk penetapan PKL dalam wilayah provinsi menjadi wewenang Pemerintahan Provinsi.

Sedangkan dalam RTRW Kabupaten disebutkan bahwa pengembangan sistem perkotaan atau kawasan perkotaan tentunya harus diarahkan sedemikian rupa agar selaras dengan arahan pengembangan wilayah. Oleh karena itu disamping pengaturan distribusi sistem kota-kota sesuai dengan hirarki jumlah penduduk dan potensi dan kegiatan ekonominya (*strategi mikro*) juga diperlukan suatu pengelolaan individual kota atau daerah perkotaan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonominya dalam rangka mendukung fungsi kotanya di wilayah yang lebih luas (*strategi makro*). Sistem pusat-pusat permukiman atau sistem kota-kota di Kabupaten Pringsewu tidak terlepas dari struktur kota ibukota kabupaten maupun kota ibukota kecamatan, dan kawasan pusat pertumbuhan perkotaan yang merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk struktur tata ruang wilayah.

Dalam Peraturan Menteri No. 16/PRT/M/2009 juga dijelaskan mengenai dasar perumusan rencana struktur tata ruang, bahwa rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

Pusat kegiatan di wilayah kabupaten merupakan simpul pelayanan sosial ekonomi masyarakat di wilayah kabupaten, yang dapat terdiri atas:

- A. PKW yang berada di wilayah kabupaten;
- B. PKL yang berada di wilayah kabupaten; dan
- C. Pusat-pusat lain di dalam wilayah kabupaten yang wewenang penentuannya ada pada pemerintah daerah kabupaten, yaitu:
 - 1) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang memiliki skala pelayanan kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa; dan
 - 2) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Tujuan perumusan rencana struktur tata ruang di Kabupaten Pringsewu, adalah :

1. Mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Mendorong masing-masing satuan wilayah pembangunan dapat memberikan kontribusi pembangunan sesuai dengan potensi wilayah.
3. Menetapkan *leading sector* yang akan dikembangkan yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya.
4. Memberikan keleluasaan bagi satuan wilayah pembangunan untuk berkembang dan memberikan kontribusi terhadap pelayanan wilayah-wilayah *hinterlandnya*.

5. Memudahkan bagi instansi teknis menyusun rencana tindak pembangunan (indikasi program) baik program tahunan maupun jangka panjang.
6. Dengan menetapkan spesifikasi kegiatan yang akan dikembangkan akan lebih memudahkan dalam menyusun skala prioritas pembangunan dimasing-masing Satuan Wilayah Pembangunan, serta dalam rangka mengakomodasikan upaya percepatan pembangunan disegala bidang.
7. Secara simultan dapat diharapkan mengurangi ketidakseimbangan perkembangan antara kawasan cepat berkembang pada pusat kota dengan kawasan belakangnya (*hinterland*).

Berkaitan dengan Struktur Ruang Wilayah di Kabupaten Pringsewu disebutkan bahwa sistem pusat-pusat kegiatan kabupaten dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan wilayah kabupaten. Pengembangan sistem pusat-pusat kegiatan meliputi:

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp), yaitu kawasan perkotaan Pringsewu di Kecamatan Pringsewu, yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan regional, pusat pelayanan kesehatan, pusat pelayanan pendidikan, pusat pengembangan pariwisata dan budaya, pusat perdagangan dan jasa, pusat koleksi dan distribusi, dan simpul transportasi regional.

2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), yaitu :
 - a. PKLp Gadingrejo di kawasan perkotaan Gadingrejo yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa, agropolitan, peternakan, perikanan, dan pusat pengembangan pendidikan skala regional;
 - b. PKLp Sukoharjo di kawasan perkotaan Sukoharjo yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, pusat pengembangan pemukiman, pusat pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, pengembangan peternakan dan industri kecil; dan
 - c. PKLp Pagelaran di kawasan perkotaan Pagelaran yang berfungsi sebagai pusat pengembangan perdagangan dan jasa, pusat pengembangan hasil pertanian, perkebunan, minapolitan, dan pengembangan kegiatan pertambangan.
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yaitu :
 - a. PPK Ambarawa di kawasan perkotaan Ambarawa yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan, pengembangan perikanan air tawar, pengembangan permukiman dan pusat pemasaran produk unggulan; dan
 - b. PPK Banyumas yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian hortikultura, pengembangan industri rumah tangga dan pengembangan kegiatan pertambangan.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

- a. PPL Adiluwih yang berfungsi sebagai pengembangan tanaman pangan dan hortikultura, pengembangan tanaman perkebunan, dan industri kecil; dan
- b. PPL Pardasuka yang berfungsi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan kehutanan, pengembangan kawasan pariwisata dan budaya dan kawasan hutan lindung

Dalam materi teknis RTRW Kabupaten Pringsewu yang menjadi rumusan tujuan penataan ruang Kabupaten Pringsewu adalah Terwujudnya Pringsewu sebagai Pusat Perdagangan dan Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan Dengan Didukung Sumberdaya Manusia Berdaya Saing Tinggi.

Dalam upaya mencapai terwujudnya tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Pringsewu maka perlu ditentukan beberapa kebijakan dan langkah strategi yang dapat ditempuh sebagai acuan dalam penataan ruang wilayah kedepannya.

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Pringsewu untuk mencapai tujuan penataan ruang adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan pusat-pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan berbasis keunggulan kompetitif dalam rangka menghilangkan ketimpangan pertumbuhan wilayah dan menumbuhkan sinergitas perkembangan perekonomian wilayah;

2. Perkuatan dan pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang seimbang dan terarah;
3. Peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu.
4. Pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;
5. Pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana;
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing;
7. Pengembangan potensi agropolitan dan minapolitan; dan
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan Negara.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut di atas, maka dirumuskan beberapa langkah strategi sebagai panduan dalam operasionalisasi pendukung kebijakan penataan ruang wilayah, yaitu meliputi :

1. Strategi pengembangan pusat-pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan berbasis keunggulan kompetitif dalam rangka menghilangkan ketimpangan pertumbuhan wilayah dan menumbuhkan sinergitas perkembangan perekonomian wilayah meliputi:
 - a. Memantapkan dan meningkatkan sistem Pusat Kegiatan Lokal menjadi Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) dan

- memantapkan PPK dan PPL dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi-fungsi pusat pelayanan perkotaan baik yang merupakan pusat administrasi maupun pusat pelayanan ekonomi;
 - c. Mengembangkan sistem pusat pemukiman dengan diikuti penyediaan sarana prasarana wilayah agar dapat memperkuat dan mempertahankan kelestarian budaya setempat; dan
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan wilayah dan penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah.
2. Strategi perkuatan dan pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang seimbang dan terarah meliputi :
- a. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang fungsi regional.
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah melalui penyediaan infrastruktur jaringan jalan dan fasilitas penghubung, jaringan air bersih, jaringan energi, telekomunikasi, dan jaringan sumber daya air yang merata;
 - c. Memelihara kelestarian kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup; dan ,
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan pertanian, perikanan, industri dan perdagangan sebagai penggerak pertumbuhan wilayah.

3. Strategi peningkatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu meliputi :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur penunjang kegiatan produksi dan pusat kegiatan wilayah;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan sarana prasarana pertanian, perikanan dan industri perdagangan;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan sarana prasarana perumahan dan pemukiman yang seimbang; dan
- d. Meningkatkan dan mengembangkan sistem distribusi perdagangan dan jasa serta akses pasar yang kondusif.

4. Strategi pemantapan sistem perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa meliputi:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pusat-pusat perdagangan dan jasa kawasan perkotaan;
- b. Meningkatkan kualitas pasar tradisional yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan jasa;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan wilayah penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah; dan
- d. Menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.

5. Strategi pengoptimalan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan yang berbasis pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi bencana meliputi:
 - a. Meningkatkan pengelolaan sumber energi dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkesinambungan;
 - b. Mempertahankan kawasan resapan air dan kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air;
 - c. Menjaga dan mengendalikan eksploitasi dan eksplorasi penambangan bahan galian dan perambahan hutan pada hutan lindung;
 - d. Menetapkan kawasan rawan bencana alam sebagai kawasan pengembangan terbatas dan mempersiapkan mitigasi bencana; dan
 - e. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkesinambungan.
6. Strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing meliputi:
 - a. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan;
 - b. Mengembangkan kawasan pendidikan terpadu dan meningkatkan mutu serta pelayanan pendidikan;
 - c. Memberdayakan masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan; dan
 - d. Mengendalikan pertumbuhan serta distribusi penduduk secara merata sesuai daya daya tampung dan daya dukung lingkungan.
7. Strategi pengembangan potensi agropolitan dan minapolitan meliputi:
 - a. Mengembangkan industri pengolahan ikan;

- b. Mengoptimalkan teknologi budidaya dan diversifikasi pertanian;
 - c. Mengembangkan industri hilir;
 - d. Meningkatkan peran masyarakat dalam industri pengolahan; dan
 - e. Mengembangkan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya air tawar, yang mengintegrasikan sentra produksi, sentra pengolahan, dan sentra pemasaran.
8. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk keamanan dan pertahanan negara meliputi;
- a. Mendukung penetapan kawasan pertanahan dan keamanan di Kabupaten Pringsewu;
 - b. Mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertanahan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Dalam rangka menentukan jenjang tingkat pelayanan setiap pusat kegiatan, tentunya perlu didukung pula oleh informasi mengenai besarnya kemampuan suatu wilayah untuk berkembang atau menerima perkembangan yang bergantung dari potensi perkembangan yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat potensi perkembangan yang dimiliki, semakin tinggi pula kemampuan pusat kegiatan tersebut dalam menerima perkembangan. Selain itu dengan potensi berkembang yang lebih baik

dibandingkan potensi berkembang wilayah lainnya juga akan menaikkan tingkat kemampuan pelayanan pusat kegiatan tersebut.

Untuk mengoptimalkan skenario pengembangan wilayah Kabupaten Pringsewu kedepannya serta memberikan arahan dalam penyusunan struktur ruang wilayah kabupaten, maka dilakukan penetapan pusat-pusat pelayanan yang juga didasarkan kepada kebijakan struktur ruang di atasnya serta hasil analisis pengembangan wilayah kedepannya. Berdasarkan Perda Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029, Perkotaan Pringsewu ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp),

1. Gadingrejo dan Sukoharjo akan dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dimana berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Gadingrejo dan Sukoharjo saat ini sudah berkembang menjadi PPK, yang merupakan kawasan perkotaan hirarki II, di bawah hirarki kawasan perkotaan Pringsewu (*Berdasarkan Kepmen PU No. 16/PRT/M/2009 dinyatakan bahwa yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanyalah PPK*)
2. Pagelaran dan Ambarawa akan dikembangkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dimana berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ke-5 (lima) pusat tersebut merupakan kawasan perkotaan hirarki III yang akan dikembangkan menjadi pusat pelayanan dan menjadi simpul transportasi bagi beberapa kecamatan

dan beberapa desa lainnya. Adiluwih, Banyumas dan Pardasuka akan dikembangkan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Untuk mengetahui lebih jelas rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Pringsewu dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Rencana Sistem Kota di Kabupaten Pringsewu

No.	Kecamatan	Fungsi Pusat Pelayanan	Peran
1.	Pringsewu	PKWp	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ibukota Kabupaten ▪ Pelayanan Pemerintahan Kecamatan ▪ Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Regional ▪ Pusat Pelayanan Jasa Perkantoran ▪ Pusat Permukiman Perkotaan ▪ Pusat Pelayanan Kesehatan ▪ Pusat Pelayanan Pendidikan ▪ Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan ▪ Pengembangan Pariwisata dan Budaya ▪ Pengelolaan Kegiatan Pertambangan ▪ Simpul Transportasi Regional
2.	Gadingrejo	PKLp	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusat Pemerintahan Kabupaten ▪ Pelayanan Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengembangan Perdagangan dan Jasa ▪ Pengembangan Permukiman Perkotaan ▪ Pusat Pengembangan Pendidikan Skala Regional ▪ Pusat Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan ▪ Pusat Pengembangan Peternakan ▪ Pengembangan Tanaman Perkebunan ▪ Pengembangan Kegiatan Pertambangan
3.	Sukoharjo	PKLp	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengembangan Perdagangan dan Jasa ▪ Pengembangan Permukiman Perkotaan ▪ Pengembangan Peternakan ▪ Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan ▪ Pengembangan Kegiatan Pertambangan ▪ Pengembangan Industri Kecil
4.	Pagelaran	PPK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengembangan Perdagangan dan Jasa ▪ Pusat Pergudangan Skala Regional ▪ Pengembangan Permukiman Perkotaan ▪ Pengembangan Pendidikan ▪ Pengembangan Pertanian Pangan ▪ Pusat Pengembangan Perikanan Air

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tawar ▪ Pengembangan Tanaman Perkebunan ▪ Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan ▪ Pengembangan Kegiatan Pertambangan ▪ Pengembangan Kegiatan Wisata Alam (<i>eco tourism</i>) ▪ Kawasan Lindung
5.	Ambarawa	PPK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Pemerintahan Kecamatan, ▪ Pengembangan Perdagangan dan Jasa ▪ Pengembangan Permukiman Perkotaan ▪ Pengembangan Pertanian Pangan ▪ Pengembangan Perikanan Air Tawar ▪ Pengembangan Kegiatan Pertambangan ▪ Pengembangan permukiman ▪ Pusat Pemasaran Produk Unggulan
6.	Adiluwih	PPL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengembangan Permukiman Pedesaan ▪ Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura ▪ Pengembangan Tanaman Perkebunan ▪ Pengembangan Industri Kecil
7.	Banyumas	PPL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengembangan Permukiman Pedesaan ▪ Pengembangan Pertanian Hortikultura ▪ Pengembangan industri Rumah Tangga. ▪ Pengembangan Kegiatan Pertambangan
8.	Pardasuka	PPL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan Pemerintahan Kecamatan ▪ Pengembangan Permukiman Pedesaan ▪ Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan ▪ Pengembangan Tanaman Perkebunan Kehutanan ▪ Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Budaya Kawasan Hutan Lindung

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Pringsewu 2010

C. Peninjauan Rencana Infrastruktur Provinsi Lampung Dan Kabupaten Pringsewu

Tinjauan terhadap rencana pengembangna infrastruktur Provinsi Lampung dan Infrastruktur. Permasalahan infrastruktur jalan yang terjadi di wilayah Provinsi lampung diantaranya:

1. Posisi Lampung sebagai Muara alur tranportasi darat Jawa – Sumatera , berdampak beban transportasi jalan di Lampung semakin tinggi dibanding Provinsi lain di Sumatera.

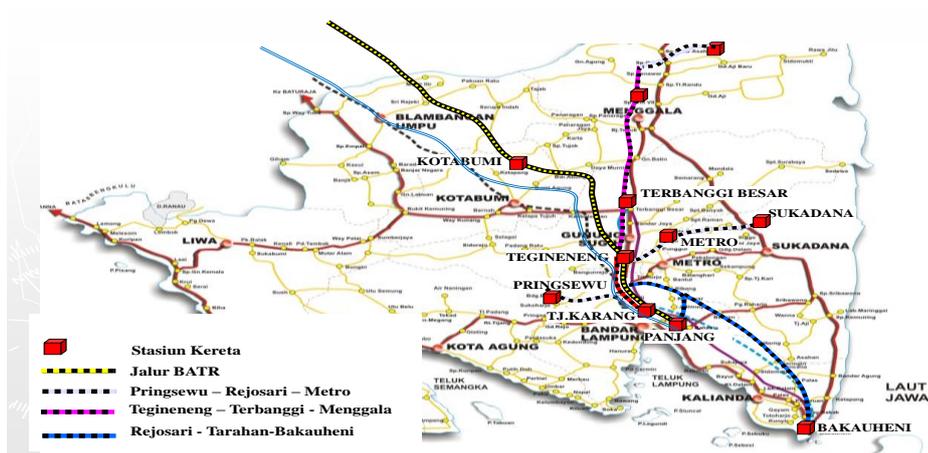
2. Status kelas jalan eksisting tidak sesuai dengan fungsi jalan. Dengan kualifikasi kelas III (MST 8-10 ton), beban angkutan kendaraan yang melewati Provinsi Lampung lebih dari MST 10 ton (al : pengangkutan batu bara).
3. Alokasi dana dari pusat (APBN & DAK) lebih rendah dari kebutuhan dan permasalahan penanganan transportasi Lampung. Prosentase anggaran MP3EI 2011-2013 untuk Sumatera hanya 10% dr anggaran nasional.
4. Terjadinya kemacetan pada ruas jalan nasional yang semakin meningkat (kualitas dan kuantitas). Akibatnya jalan Provinsi sebagai jalan alternatif (kelas jalan lebih rendah), sehingga jalan provinsi menjadi semakin cepat rusak.

Sistem jaringan jalan di Provinsi Lampung terdiri dari:

1. Jaringan jalan arteri primer berfungsi sebagai jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
2. Jaringan jalan kolektor primer berfungsi sebagai jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), atau antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
3. Pengembangan Jaringan jalan Lokal Primer yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

Lampung dimana digambarkan bahwa penyelenggaraan jalan nasional merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, penyelenggaraan jalan provinsi merupakan kewenangan pemerintah provinsi, dan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota.

Di sektor transportasi, dengan pesatnya permintaan akan angkutan penumpang dan barang, maka solusi paling mutakhir adalah penyediaan angkutan massal yang strategis dan handal. Angkutan Kereta Api adalah merupakan salah satu jawaban untuk pemenuhan kebutuhan angkutan massal baik penumpang maupun barang. Untuk itu pemerintah perlu melengkapi dan semakin mengembangkan infrastruktur angkutan Kereta Api. Berikut merupakan peta rencana pengembangan infrastruktur perkeretaapian di Provinsi Lampung:



Gambar 2 Rencana Infrastruktur Kereta Api

Pengembangan sistem jaringan transportasi Kabupaten Pringsewu direncanakan mampu meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu. Strategi yang akan dilakukan untuk meningkatkan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut antara lain dengan menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, pengembangan pusat pertumbuhan, serta mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan serta mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah disekitarnya.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Pringsewu ditempuh melalui upaya meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat. Rencana pengembangan sistem transportasi dalam hal ini mencakup pengembangan sistem jaringan transportasi darat yang meliputi sistem jaringan jalan, terminal serta sistem jaringan kereta api.

1. Sistem Jaringan Jalan

Dari data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu terdapat beberapa rencana berkaitan dengan sistem transportasi. Seperti terdapat rencana pembangunan :

1. Jaringan jalan provinsi meliputi :
2. Pringsewu - Bandung Baru; dan
3. Batas Pringsewu - Sukoharjo.

Pengembangan jaringan jalan kabupaten meliputi :

- a. jaringan jalan lokal primer meliputi seluruh jaringan jalan selain jalan provinsi di dalam Kabupaten Pringsewu meliputi ruas jalan Pringsewu, Gadingrejo, Sukoharjo, Adiluwih, Banyumas, Pagelaran, Ambarawa dan Pardasuka;
- b. jaringan jalan strategis kabupaten meliputi ruas jalan Sukoharjo – Sukoharum menuju terminal induk Rejosari dan Bandara Raden Intan melalui Negerikaton Kabupaten Pesawaran;
- c. pengembangan jalan dua jalur Kota Pringsewu dari Wates Kecamatan Gadingrejo- Pajaresuk Kecamatan Pringsewu;
- d. pengembangan jaringan jalan lingkaran utara dan lingkaran selatan Kota Pringsewu;
- e. pembangunan jalan akses yang menghubungkan Kabupaten Pringsewu - Kabupaten Lampung Tengah yang akan menghubungkan jalan lintas Barat dengan jalan lintas tengah Padang Ratu; dan
- f. perbaikan dan peningkatan kualitas seluruh jaringan jalan dan jembatan di Kabupaten Pringsewu serta pengembangan jalan usaha tani dan jalan produksi khususnya pada kawasan agropolitan dan minapolitan. (Perda RTRW Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012).

2. Jaringan Prasarana Jalan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pengembangan fasilitas terminal di wilayah Kabupaten Pringsewu perlu dilakukan, mengingat hingga saat ini belum terdapat terminal untuk penumpang yang memadai, baik dari segi daya tampung, lokasi maupun kualitas pelayanan. Dengan memperhatikan rencana struktur ruang yang telah dirumuskan, rencana pengembangan sistem jaringan jalan dan keberadaan terminal yang ada (eksisting), jenis dan kelas pelayanannya, maka rencana terminal angkutan penumpang untuk Kabupaten Pringsewu adalah

1. Pengembangan terminal tipe B di Sukoharjo mengantisipasi akses jalan yang akan dikembangkan di ruas jalan sukoharjo menuju terminal induk Rejosari dan bandara Raden Intan;
2. Pemantapan dan peningkatan terminal Tipe C di Kecamatan Gadingrejo; dan
3. Membangun shelter atau tempat pemberhentian bus/angkutan umum khususnya pada kawasan perkotaan.

Adapun syarat-syarat yang diperlukan bagi pengembangan terminal angkutan penumpang tipe B adalah sebagai berikut :

1. Terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi;
2. Terletak di jalan arteri atau kolektor dengan kelas jalan sekurang-kurangnya kelas II B;

3. Jarak antara 2 terminal penumpang tipe B atau dengan terminal tipe A sekurang-kurangnya 15 km;
4. Tersedia lahan sekurang-kurangnya 3 Ha untuk terminal;
5. Mempunyai akses jalan masuk atau keluar ke dan dari terminal dengan jarak sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari jalan ke pintu keluar atau masuk terminal.

Selain terminal tipe B, rencana pengembangan terminal juga akan mengarahkan pembangunan sub-sub terminal di dalam wilayah Kabupaten Pringsewu yang berfungsi memberikan dukungan aktivitas pergerakan kendaraan umum, sebagai tempat menurunkan penumpang dan pergantian moda dengan tingkat pelayanan yang lebih kecil. Lokasi sub-sub terminal akan diarahkan pada pusat-pusat pelayanan dalam wilayah Kabupaten Pringsewu sesuai dengan skala pelayanan yang dimilikinya. (Perda RTRW Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012)

3. Sistem Jaringan Perkeretaapian.

Dalam rencana pengembangan jaringan jalur kereta api terdapat pembagian antara jaringan jalur kereta api Nasional dan jaringan jalur kereta api Regional. Rencana pengembangan rel kereta api di Kabupaten Pringsewu adalah jaringan jalur kereta api regional yang melayani pergerakan orang dan barang di dalam wilayah Provinsi Lampung. Berdasarkan jenisnya, jaringan jalur kereta api yang dikembangkan di wilayah ini adalah berupa jaringan perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus.

1. Perkeretaapian umum adalah perkeretaapian antarkota yang melayani angkutan orang dan barang yang menghubungkan Bandar Lampung - Rejosari - Gedung Tataan – Pringsewu dengan jalur angkutan penumpang mulai dari Tanjung Karang – Rejosari - Gedungtatan – Gadingrejo – Pringsewu- Pagelaran.
2. Perkeretaapian khusus melayani angkutan barang dari stasiun Tanjung Karang ke stasiun Pringsewu.
3. Penataan stasiun kereta api yang ada meliputi stasiun kecil Gadingrejo dan Pagelaran.

Namun tidak menutup kemungkinan apabila di masa mendatang dapat dikembangkan sebagai jalur perkeretaapian nasional yang dapat menghubungkannya dengan pusat pertumbuhan lain di Pulau Sumatera dan terintegrasi dengan jalur perkeretaapian nasional yang telah ada saat ini. Beberapa hal yang termuat dalam strategi pengembangan jaringan jalur kereta api di wilayah Kabupaten Pringsewu ini antara lain :

1. Mengembangkan jaringan transportasi kapasitas tinggi khususnya untuk angkutan orang atau barang serta produk komoditas berskala besar.
2. Menyediakan moda transportasi massal penumpang dan barang, yang terkoneksi dalam sistem jaringan kereta api Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Lampung.
3. Mendukung pengembangan sistem kota-kota di Sumatera yang terpadu melalui pengintegrasian kota-kota pantai dan berbagai kegiatan

perekonomian, baik industri, pertambangan, maupun pariwisata serta kota-kota Agropolitan, baik kehutanan, pertanian maupun perkebunan.

4. Pengembangan jalur rel kereta api yang menghubungkan ruas jalur kereta melalui Bandar Lampung – Rejosari – Gedongtataan – Pringsewu – Pagelaran.

Dalam rencana pengembangan jalur kereta api juga dimuat mengenai rencana pengembangan stasiun kereta api umum antar kota. Pengembangan jalur kereta api dengan rute Bandar Lampung – Pringsewu akan didukung oleh alternatif penempatan stasiun keberangkatan dan kedatangan di Kecamatan Gadingrejo dan di Kecamatan Pagelaran.

D. Potensi Ekonomi Wilayah

Dalam kurun waktu 2007 – 2009, kontribusi sektor-sektor ekonomi dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pringsewu atas dasar harga berlaku memperlihatkan kecenderungan fluktuasi, baik meningkat maupun menurun. Sektor-sektor yang menunjukkan kecenderungan tingkat kontribusi atau distribusi dalam PDRB mengalami peningkatan dalam kurun waktu tersebut adalah Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Transportasi dan Komunikasi; serta . Sektor Jasa-jasa. Dalam kurun waktu 2007 – 2009 tersebut, Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan, kontribusinya mengalami peningkatan rata-rata sekitar 1,56%, yaitu dari 44,12% pada Tahun 2007 menjadi 45,51% pada Tahun 2009. Untuk Sektor Transportasi dan Komunikasi kontribusinya

mengalami peningkatan rata-rata sekitar 3,58%, yaitu dari 4,67% pada Tahun 2007 menjadi 5,01% pada Tahun 2009. Sedangkan sektor lain yang juga mengalami peningkatan adalah Sektor Jasa, kontribusi sektor ini mengalami peningkatan rata-rata sekitar 2,24% dari 10,91% pada Tahun 2007 menjadi 11,40% pada Tahun 2009.

Namun, bila dilihat kepada sub sektor dalam data PDRB dari Tahun 2007 – 2009, terlihat bahwa komponen penyumbang PDRB Kabupaten Pringsewu yang terbesar sesungguhnya masih berada pada sub sektor tanaman bahan makanan (sektor pertanian) pada setiap tahunnya. Sebagai contoh data PDRB pada Tahun 2009 memperlihatkan sub sektor tanaman bahan makanan memberikan kontribusi (distribusi) sebesar Rp. 629.930 juta atau 25,09% dari total nilai PDRB Kabupaten Pringsewu. Sementara itu dari Tahun 2007 – 2009 kontribusinya mengalami peningkatan rata-rata sekitar 3,30%. Selain sub sektor tersebut ada 2 (dua) sub sektor lain yang kontribusinya terlihat cukup signifikan mempengaruhi nilai PDRB Kabupaten Pringsewu, yaitu sub sektor peternakan (sektor pertanian), yaitu sekitar 7,36%, serta sub sektor perdagangan besar dan eceran (sektor perdagangan), yaitu sekitar 15,45%. (Materi Teknis RTRW Kabupaten Pringsewu, 2010).

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, dapat diperoleh gambaran bahwa sektor pertanian masih memberikan nilai pengaruh cukup besar terhadap nilai PDRB atau kondisi perekonomian di Kabupaten Pringsewu. Meskipun begitu peningkatan kontribusinya masih terasa bergeser sedikit

saja (hanya 1,56%), apabila dibandingkan dengan beberapa sub sektor lainnya yang kontribusinya (distribusinya dalam PDRB) mengalami peningkatan cukup besar. Beberapa sub sektor yang kontribusinya mengalami peningkatan tersebut diantaranya adalah sub sektor perbankan (sektor keuangan) dan sub sektor kehutanan (sektor kehutanan).

E. Teori, Ruang dan Wilayah

1. Teori Ruang

Menurut istilah geografi umum, yang dimaksud dengan ruang (space) adalah seluruh permukaan bumi yang merupakan lapisan biosfera, tempat hidup tumbuh – tumbuhan, hewan, dan manusia. Menurut geografi regional, ruang dapat merupakan suatu wilayah yang mempunyai batas geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial, atau pemerintahan, yang terjadi dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah dibawahnya serta lapisan udara diatasnya, jadi penggunaan tanah dapat berarti pula tata ruang (Jayadinata , 1999).

Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, yang dimaksud adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang merupakan tempat bagi komponen - komponen lingkungan hidup dalam melakukan setiap proses,

yaitu saling mempengaruhi (interaksi), saling berhubungan (interelasi), dan saling ketergantungan (interdependensi) .

2. Teori Wilayah dan Perencanaan Wilayah

Wilayah yakni ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wilayah diartikan sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Dalam kerangka pembangunan nasional, perencanaan pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil perbedaan pertumbuhan kemakmuran antar wilayah atau antar daerah. Di samping itu, diusahakan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran antara perkotaan dan pedesaan (Jayadinata , 1999).

Suatu wilayah dalam pengertian geografi merupakan kesatuan alam yang serba sama, atau homogen atau seragam, dan kesatuan manusia yaitu masyarakat serta kebudayaan yang serba sama yang mempunyai ciri yang khas sehingga wilayah tersebut dapat dibedakan dari wilayah lainnya.

Terdapat dua macam wilayah yaitu :

1. Pengertian internasional, wilayah dapat meliputi beberapa negara yang mempunyai kesatuan alam dan kesatuan manusia
2. Pengertian nasional, wilayah merupakan sebagian dari negara tetapi bagian tersebut mempunyai kesatuan alam dan kesatuan manusia

Selain itu terdapat pula istilah wilayah fungsional yaitu suatu bagian dari permukaan bumi dimana keadaan alam yang berlawanan memungkinkan timbulnya bermacam – macam kegiatan, yang saling mengisi dalam kehidupan penduduk.

Jika pengertian wilayah formal dan wilayah fungsional dihubungkan dengan perencanaan , dapat dikenal dua macam pendekatan dalam perencanaan wilayah, yaitu:

1. Pendekatan teritorial, untuk perencanaan suatu wilayah formal. Menurut Friedman dan Weaver, perencanaan semacam itu memperhitungkan mobilisasi terpadu dari semua sumber daya manusia dan sumber daya alam dari suatu wilayah tertentu yang terciptakan oleh perkembangan sejarahnya. Perencanaan semacam itu dapat disebut perencanaan wilayah teritorial atau perencanaan wilayah formal . Menurut Stohr strategi pengembangan dari bawah ke atas berlandaskan perencanaan wilayah formal itu. Friedman mengemukakan bahwa perencanaan wilayah teritorial adalah peningkatan perkembangan dengan melayani aspirasi masyarakat.
2. Pendekatan fungsional yaitu suatu perencanaan wilayah, yang menurut Friedman dan Weaver, memperhitungkan lokasi berbagai kegiatan ekonomi dan pengaturan secara ruang dari sistem perkotaan mengenai berbagai pusat dan jaringan. Hal tersebut banyak berhubungan dengan beberapa model , seperti model gravitasi, analisis masukan – keluaran, dan sebagainya. Perencanaan semacam itu dapat disebut perencanaan wilayah fungsional . Strategi pengembangan dari

atas kebawah itu menurut Stohr berlandaskan perencanaan wilayah fungsional itu (Jayadinata,1999).

Jhon Friedman dan William Alonso menampilkan empat macam wilayah yaitu:

1. Daerah Metropolitan adalah kota metropolitan yang berpenduduk diatas 10 juta sampai 20 juta jiwa, luasan perkotaannya sangat besar, merupakan pusat kegiatan skala internasional, maka diperlukan penataan ruang perkotaannya secara mantap .
2. Wilayah poros pembangunan adalah wilayah yang menghubungkan dua atau lebih kota besar , yang dihubungkan oleh jalan arteri primer. Jalan besar yang lebar dan mulus dapat melayani lalu lintas moda transportasi jalan yang menyangkut manusia dan barang yang dilakukan secara cepat, lancar, dan berfrekuensi tinggi
3. Wilayah tertekan telah mendapat perhatian dalam pengembangan wilayah karena wilayah yang dimaksud tidak memiliki sumber daya alam yang dapat dikembangkan untuk membangun daerahnya, untuk memberikan pendapatan dan kehidupan yang layak bagi penduduknya.
4. Wilayah perbatasan adalah penting dalam pengembangan wilayah karena terletak di bagian terluar atau terdepan berbatasan dengan negara lain. Pada umumnya wilayah perbatasan merupakan wilayah tertinggal (rendah tingkat kesejahteraan masyarakatnya, meski memiliki sumber daya potensial yang cukup berarti tetapi tidak

dimanfaatkan dan dikembangkan karena jumlah penduduknya sangat sedikit. (adisasmitha, 2011).

F. Teori Pengembangan Wilayah

Dalam banyak kepustakaan tentang pembangunan, terdapat beberapa pendekatan dan teori. Menurut Sirojuzilam (2005), pengembangan wilayah pada dasarnya merupakan peningkatan nilai manfaat bagi masyarakat suatu wilayah tertentu, mampu menampung lebih banyak penghuni dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rata-rata membaik, disamping menunjukkan lebih banyak sarana/prasana, barang atau jasa yang tersedia dan kegiatan usaha-usaha masyarakat yang meningkat, baik dalam arti jenis, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya (Sirojuzilam 2005, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35533/4/Chapter%20II.pdf>)

Teori - teori pengembangan wilayah menganut berbagai azas/dasar berdasarkan tujuan penerapan masing-masing teori. Berbagai paradigma teori pengembangan wilayah dapat dirangkum sebagai berikut (Purboyo, 2001),

1. Teori yang memberi penekanan kepada kemakmuran wilayah
2. Teori yang menekankan pada sumber daya lingkungan dan faktor alam yang dinilai dapat mempengaruhi keberlanjutan sistem kegiatan produksi di suatu daerah (*sustainable production activity*). Kelompok penganut teori ini sering disebut sangat peduli dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*)
3. Teori yang memberi penekanan kepada kelembagaan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, sehingga kajian teori ini terfokus

kepada *good governance* yang bisa bertanggungjawab dan berkinerja bagus

4. Teori yang perhatiannya tertuju kepada kesejahteraan masyarakat yang tinggal di suatu lokasi (*people prosperity*) (Dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35533/4/Chapter%20II.pdf>)

Menurut Dusseldrop dapat dibuat tiga macam wilayah pengembangan :

1. Menurut prinsip homogenitas atau uniformitas, yaitu wilayah geografi fisik/sosial, wilayah ekonomi, atau wilayah budaya. Akan baik sekali jika macam wilayah yang dipilih berhimpit dengan daerah administrasi.
2. Menurut konsep hubungan ruang, yaitu wilayah fungsional yang disebut juga wilayah terpusat.
3. Menurut wilayah yang khusus yaitu wilayah terbelakang , wilayah aliran sungai, dan sebagainya.

Pengembangan wilayah menurut sistem perkotaan, yang termasuk perencanaan wilayah fungsional serta mempunyai hubungan dalam ruang (spatial) atau hubungan difusi yang meliputi

1. Konsep pertumbuhan kota (*Growth Pole*), yang terpusat dan mengambil tempat (kota) tertentu sebagai pusat pengembangan yang diharapkan menjalarkan perkembangan ke pusat – pusat yang tingkatannya lebih rendah.
2. Konsep Agropolitan, yang berprinsip desentralisasi dan mengiktsertakan sebagian besar penduduk wilayah yaitu penduduk pedesaan yang bertani,dalam pembangunan.

Dalam pelaksanaan pengembangan wilayah harus diperhatikan:

1. Perencanaan harus disertai oleh kekuasaan efektif untuk pelaksanaan
2. Bagi suatu kebijaksanaan harus terdapat ikatan politis yang tetap
3. Untuk pengembangan wilayah harus dibuat peraturan (sarana)
4. Dalam pengembangan antar wilayah harus dipertahankan adanya keseimbangan nasional.(Jayadinata,1999).

G. Perencanaan Wilayah

Dewasa ini perencanaan dilakukan pada tingkat kota dan wilayah. Sejumlah fungsi seperti transportasi, penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, pencegahan polusi, dan pengembangan ekonomi, dilakukan pada tingkat wilayah, walaupun tidak pernah dibuat peraturan daerah yang benar – benar serbaguna. Maka perencanaan pada tingkat wilayah cenderung berupa saran pada peraturan daerah yang sudah ada di negara-bagian, distrik (*country*) dan kotapraja. Tingkat – tingkat ini mempunyai proses perencanaan sendiri, yang seringkali berkaitan dengan rencana wilayah (Catanese, 1992).

Perencanaan merupakan suatu aktivitas universal manusia, suatu keahlian dasar dalam kehidupan yang berkaitan dengan pertimbangan suatu hasil sebelum diadakan pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada (Catanese,1992).

Secara historis setidaknya terdapat tiga pendekatan perencanaan wilayah (Jayadinata, 1999), yaitu:

1. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada masalah kota yang bersifat sosial. Pelaksanaannya meliputi perbaikan bagian kota

yang keadaan yang telah rusak dan tidak memenuhi standar, pemugaran kota, pembuatan kota satelit untuk membantu meringankan kota industri yang terlalu padat penduduknya. Titik berat perencanaan wilayah semacam ini ditujukan pada kota yang besar dan wilayah sekelilingnya (hinterland) yang dapat menunjang kota dalam perencanaan kota dan wilayah.

2. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada wilayah yang penduduknya banyak menganggur dan dalam keadaan stagnasi industri (wilayah khusus). Dalam wilayah seperti ini, pemerintah perlu mengatur intensif pembiayaan, pengaturan rangsangan untuk prasarana industri, pengaturan konsesi pajak dan sebagainya, sehingga industri tertentu dapat berlokasi di wilayah itu.
3. Perencanaan wilayah yang memperhatikan wilayah pedesaan, dengan pengembangan tanah bagi sektor pertanian dan rekreasi (perencanaan pedesaan dan wilayah). Hal ini dilakukan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran antara pedesaan dan perkotaan

H. Transportasi dan Pengembangan Wilayah

1. Pengertian dan Fungsi Transportasi

Transportasi atau transpor diartikan sebagai tindakan atau kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan (barang dan orang) dari suatu tempat ke tempat lain, atau dari tempat asal. Transportasi merupakan bagian integral dari suatu fungsi masyarakat, dan menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan gaya hidup, jangkauan dari lokasi

kegiatan yang produktif, dan selingan serta barang – barang dan pelayanan yang tersedia untuk dikonsumsi. (Morlock, 1995).

Fungsi utama transportasi ada dua, yaitu :

1. Sebagai penunjang (*servicing facility*) dimaksudkan jasa transportasi itu melayani pengembangan kegiatan sektor – sektor lain, misalnya jasa transportasi dapat menunjang kegiatan sektor pariwisata melalui pelayanan pengangkutan para wisatawan menuju ke dan dari obyek wisata.
2. Transportasi berfungsi sebagai pendorong pembangunan (*promoting facility*), dimaksudkan bahwa pengadaan.pembangunan fasilitas (prasarana dan sarana) transportasi diharapkan dapat membuka keterisolasian, keterpencilan, keterbelakangan daerah – daerah serta daerah – daerah perbatasan.

Pelayanan jasa prasarana transportasi menempati peranan penting dan khusus dalam menunjang pengembangan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan . Di daerah pedesaan yang berkembang pesat memperlihatkan kecenderungan berubah menjadi daerah perkotaan, sehingga memerlukan pengadaan prasarana jalan yang cukup dan berkapasitas untuk melengkapi kebutuhan sehari – hari. Pembangunan daerah pedalaman sangat memerlukan transportasi (jalan) dalam rangka membuka daerah – daerah terisolasi tersebut. Keterbukaan daerah – daerah yang tadinya terisolasi akan memberikan kontribusi pada peningkatan kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga akan dicapai kondisi

peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi, (Adisasmita, 2011).

2. Transportasi Dan Pengembangan Wilayah

Tugas utama pemerintah daerah adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan efisien.
2. Melaksanakan pembangunan daerah yang merata keseluruh bagian wilayah.
3. Menyediakan pelayanan umum kepada masyarakat publik secara cepat, murah dan bermutu.

Semua tugas utama tersebut berdimensi antar instansi pemerintah daerah, yaitu menyangkut koordinasi dalam strategi kebijakan, perencanaan, dan implementasinya. (Adisasmita ,2011).

Dengan demikian, jaringan transportasi disediakan keseluruh bagian wilayah dalam suatu wilayah kabupaten yang dilayani oleh fasilitas sarana dan prasarana transportasi yang berkapasitas cukup, sehingga dapat memenuhi kebutuhan jasa transportasi keseluruh bagian wilayah dan antar wilayah.

Peningkatan dan bertambahnya luas pembangunan daerah ke seluruh wilayah kabupaten, pengolahan lahan (pertanian) bertambah luas, produksi berbagai komoditas hasil pertanian dan sektor lainnya akan meningkat, yang berarti nilai produk kabupaten bruto akan meningkat, dampak selanjutnya adalah pendapatan per kapita kabupaten yang

mencerminkan kesejahteraan masyarakat bertambah lebih tinggi. Peningkatan nilai produk kabupaten bruto dan pendapatan per kapita kabupaten merupakan indikator pertumbuhan dan pengembangan ekonomi kabupaten (wilayah).

Terjadinya pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah di dukung oleh tersedianya fasilitas transportasi, sehingga dapat dikatakan bahwa penyediaan fasilitas transportasi merupakan kekuatan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan ekonomi wilayah. (Adisasmita, 2011)

Pembangunan prasarana transportasi dalam konteks spasial, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan perekonomian suatu wilayah atau kawasan. Hal ini disebabkan banyak analisis spasial yang memperhatikan faktor jarak pada pembangunan prasarana dan sarana transportasi itu sendiri.

Menurut Jinca (1987:21) permintaan jasa transportasi tidak hanya dipengaruhi aspek fisik saja, melainkan juga aspek sosial ekonomi dari suatu wilayah. Perencanaan fasilitas transportasi harus memperhatikan ketiga aspek diatas, agar kegunaan(utilitas) cukup efisien untuk memenuhi kebutuhan pada saat sekarang maupun masa mendatang, yaitu dengan kriteria cukup dalam kuantitas dan kualitas dan layak secara ekonomi. Dengan demikian jasa transportasi dapat berfungsi ganda yaitu (a) Mampu menunjang sektor-sektor pembangunan lainnya, (b) Harus mampu merangsang pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Uraian tersebut menggambarkan, bahwa transportasi yang baik akan

melahirkan manfaat *multiplier effect* yang besar baik terhadap pengembangan suatu wilayah/kawasan maupun dampak langsung pada peningkatan derajat kehidupan masyarakat (Dalam Abdul Wahab, Undip 2009).

I. Isue Strategis di Kabupaten Pringsewu

Beberapa point yang menjadi isue strategis di Kabupaten Pringsewu berkaitan dengan rencana pengembangan wilayah Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

1. Posisi yang strategis pada koridor utama jalur lintas barat dan pertemuan dengan jalur penghubung lintas barat dan jalur lintas tengah Sumatera, menempatkan Kabupaten Pringsewu sebagai wilayah cepat tumbuh berkembang terutama terlihat signifikan di sepanjang koridor jalan utama dalam wilayah ini yang berada di Kecamatan Pringsewu.
2. Kota Pringsewu merupakan wilayah yang diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp). Peningkatan peran tersebut menjadikan wilayah ini dipacu untuk berkembang dengan cepat sehingga mampu menjadi pusat pelayanan baik bagi wilayahnya sendiri maupun wilayah belakangnya. Kondisi ini terlihat dengan munculnya berbagai prasarana dan sarana wilayah yang berskala regional, seperti : Bank, Pasar Regional, Rumah Sakit Umum Pemerintah dan Swasta, dsb. Pada saat masih bergabung dengan kabupaten induk Kabupaten Tanggamus, wilayah Kota Pringsewu telah berperan menjadi salah satu pusat pelayanan. Dengan pemekaran wilayah yang dialami saat ini, akan

semakin mendorong peningkatan kapasitas pelayanan wilayah menjadi lebih besar dan lebih luas tanggungjawabnya dibandingkan dengan kapasitas sebelumnya saat sebelum mengalami pemekaran wilayah.

3. Rencana pengembangan jalan lingkar luar koridor utara dan selatan Pringsewu. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan kegiatan pada koridor utama pusat kota, yaitu di Kecamatan Pringsewu. Dengan semakin berkembangnya lalu lintas pergerakan yang melintas di kawasan tersebut, mengakibatkan ketidakseimbangan antara fungsi kawasan dengan beban lalu lintas yang melaluinya. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan konflik pergerakan yang lebih besar kedepannya, seperti kemacetan, penumpukan aktivitas ekonomi, dsb.
4. Peningkatan pertumbuhan Kabupaten Pringsewu, membutuhkan dukungan aksesibilitas yang lebih baik dengan pusat kegiatan skala provinsi dan pusat kegiatan lain yang skala pelayanannya lebih luas. Mengantisipasi kebutuhan tersebut dikembangkan alternatif sarana transportasi darat melalui dikembangkannya rencana jalur rel kereta api Bandar Lampung – Pringsewu, yang akan melalui Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pagelaran.
5. Peluang munculnya berbagai permasalahan/konflik sosial dan lingkungan sebagaimana biasa terjadi pada kawasan perkotaan, yang dipicu oleh meningkatnya angka migrasi penduduk ke wilayah ini karena daya tarik perkembangan wilayah sebagai pusat perekonomian, seperti terjadi di wilayah Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Sukoharjo.

6. Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah yang memberikan perhatian cukup besar terhadap dunia pendidikan, terlihat pada komitmennya dalam berupaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Saat ini sudah tersebar berbagai institusi pendidikan yang memiliki tingkat pelayanan skala regional di wilayah ini, seperti di Kecamatan Pringsewu. Kondisi ini memicu adanya arahan pengembangan kawasan khusus bagi kegiatan pendidikan berskala regional yang dapat membantu terbentuknya karakter ruang kawasan.
7. Perkembangan kawasan berciri perkotaan di wilayah Kabupaten Pringsewu mendorong terjadinya alih fungsi lahan, khususnya terhadap lahan pertanian tanaman pangan dan jaringan irigasi didalamnya, menjadi lahan-lahan terbangun seperti yang mulai terjadi di Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Ambarawa. Dalam penanganannya diperlukan kebijakan perlindungan lahan pertanian.
8. Potensi pengembangan lahan cadangan pengembangan kawasan perkotaan di bagian selatan, yaitu Kecamatan Pardasuka dan Kecamatan Ambarawa. Hal ini dimungkinkan mengingat ketersediaan lahan bagi lahan tempat tinggal yang masih tersedia luas, sehingga menjadi alternatif bagi para penduduk yang ingin mencari alternatif lokasi tempat tinggal.
9. Pergeseran struktur perekonomian Kabupaten Pringsewu, seiring dengan berkembangnya kegiatan perekonomian wilayah, membuat peluang pula bagi berkembangnya bisnis perdagangan dan jasa. Hal tersebut sejalan dengan mulai meningkatnya kontribusi tersier

(perdagangan dan jasa) dan sektor sekunder (industri pengolahan). Kondisi ini tentu berpengaruh pula terhadap penataan ruang wilayah kedepannya.

10. Pengembangan komoditi unggulan pada sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi sektor basis, seperti Padi, Jagung, Lada, Cengkeh, Tembakau dsb. Komoditi berpotensi nilai ekspor tersebut mampu mendorong peningkatan perekonomian wilayah. Pengembangan komoditi ini diarahkan pada wilayah yang diarahkan bagi pengembangan pertanian seperti Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka.
11. Intensifikasi lahan pertanian dan perkebunan dengan memanfaatkannya sebagai kegiatan pariwisata yang berorientasi kepada kegiatan pertanian dan perkebunan atau agrowisata. Pengembangan kegiatan dapat ini diarahkan pada wilayah yang diarahkan bagi pengembangan pertanian seperti Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka.
12. Kabupaten Pringsewu memiliki potensi komoditi peternakan dan perikanan darat yang cukup besar. Kondisi ini terlihat pada pengembangan potensi sapi potong di Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Sukoharjo, serta pengembangan potensi perikanan air tawar di Kecamatan Pagelaran.
13. Kabupaten Pringsewu memiliki kekayaan kandungan bahan tambang/galian. Kondisi tersebut memicu tumbuhnya aktivitas usaha pertambangan yang selama ini identik dengan kerusakan lingkungan.

Diperlukan kebijakan penanganan pengelolaan kegiatan pertambangan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan di wilayah ini kedepannya. Kegiatan ini diarahkan pada Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Banyumas, Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Pringsewu.

14. Kabupaten Pringsewu merupakan kawasan transmigrasi yang telah mengalami perkembangan pesat, menjadi bagian historis yang tidak bisa terlepas dari dinamika perkembangan wilayah ini kedepannya, khususnya aspek sosial budaya. Gambaran khas sosial budaya tersebut dapat terlihat pada beberapa bangunan dan kehidupan sosial masyarakat diantaranya di Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pardasuka.
15. Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah yang tidak terlepas dari ancaman bencana. Hal tersebut dapat ditunjukkan diantaranya melalui daerah rawan bencana banjir yang mengancam Kabupaten Pringsewu pada daerah yang memiliki kondisi fisiografi aluvial berupa luapan sungai-sungai yang mengalir melalui daerah aluvial tersebut. Bencana tanah longsor juga merupakan potensi bencana yang terutama dapat terjadi pada kawasan dengan kelerengan $> 25\%$ yang terdapat di Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Pardasuka dan Kecamatan Banyumas. Potensi bencana alam lain yang juga mengancam wilayah Kabupaten Pringsewu adalah potensi gempa bumi, dengan intensitas skala gempa MMI IV–V dan V–VI. Sehingga sejak dini diperlukan perencanaan berbasis mitigasi bencana sebagai antisipasi dampak yang terjadi kedepannya (Materi Teknis RTRW Kabupaten Pringsewu,2010)

Terkait dengan “**karakteristik wilayah**” Kabupaten Pringsewu, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kondisi fisik geografis wilayah Kabupaten Pringsewu secara umum berada pada wilayah yang dapat dikembangkan bagi pengembangan kawasan budidaya secara optimal. Wilayah ini berada pada ketinggian daerah yang masih dapat dikembangkan berbagai jenis tanaman sebagaimana halnya yang dapat dikembangkan pada daerah tropis. Secara morfologi, wilayah ini juga memiliki topografi yang masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan kawasan terbangun dan lahan pertanian serta perkebunan. Namun begitu perlu diperhatikan keberadaan kawasan hutan di bagian selatan dan barat laut, sebagai hulu aliran sungai, agar tidak menimbulkan bahaya bagi kawasan dibawahnya.
2. Berdasarkan faktor kebencanaan wilayah Kabupaten Pringsewu sebagian besar berada pada tingkat kerawanan bencana yang cukup rendah, sehingga untuk mengantisipasinya dapat dilakukan pendekatan pembangunan dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, tingkat ketahanan bangunan yang baik, penggunaan bahan-bahan kimia yang rendah tingkat cemar lingkungannya, dsb.
3. Wilayah Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah dengan kondisi lahan budidaya non-terbangun masih sangat luas, dimana kawasan pertanian dan perkebunan serta ruang terbukanya memiliki luasan sekitar 66,25% dari total luas wilayah keseluruhan. Hal ini tentu menjadi potensi yang akan sangat mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah ini, karena sebagai kawasan baru berkembang yang ingin memacu tingkat

pertumbuhan ekonominya, sangat membutuhkan lahan yang dapat dikembangkan.

4. Persebaran penduduk di wilayah Kabupaten Pringsewu dapat dikatakan saat ini masih terkonsentrasi di sekitar pusat pemerintahan Kabupaten Pringsewu dan setiap pusat kegiatan di tingkat kecamatan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Pringsewu (1.427 jiwa/km²) dan kecamatan lain disekitarnya seperti Kecamatan Ambarawa (1.040 jiwa/km²) dan Kecamatan Gadingrejo (803 jiwa/km²). Dan diprediksi 20 (duapuluh) tahun mendatang kepadatannya akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan perekonomian serta berkembangnya karakter perkotaan pada kawasan tersebut.
5. Kabupaten Pringsewu telah memiliki prasarana dan sarana perekonomian wilayah skala regional.
6. Secara perekonomian wilayah, Kabupaten Pringsewu masih ditopang oleh kontribusi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian daerah (sekitar 45,51%). Hal ini sejalan dengan karakteristik mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bekerja pada sektor primer (pertanian). Namun kedepan hal tersebut tentunya bisa saja berubah, mengingat bahwa angka pertumbuhan ekonomi sektor-sektor tersier menunjukkan ke arah yang positif dan cenderung meningkat. Hal tersebut mengindikasikan kemungkinan bergesernya pola mata pencaharian dan struktur perekonomian dari Kabupaten Pringsewu. Dari yang semula berorientasi pada pertanian berubah orientasi kepada non-pertanian

(perdagangan, jasa, retail, industri, dsb). Kondisi demikian tentunya akan merubah karakter wilayah dari perdesaan menjadi perkotaan. (Materi Teknis RTRW Kabupaten Pringsewu, 2010).

Berdasarkan gambaran karakter tersebut di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah yang didominasi oleh kawasan relatif datar dengan dukungan kondisi sumberdaya alam dan potensi kebencanaan yang rendah. Selain itu dengan semakin lengkapnya infrastruktur wilayah dan potensi SDM yang makin berkembang, menjadikan Kabupaten Pringsewu sebagai wilayah potensial berkembang cepat dan mampu bersaing dengan wilayah lainnya dalam lingkup Provinsi Lampung.

J. Metode Penelitian

Setiap tahapan pembangunan suatu bangsa biasanya dicirikan oleh pengorganisasian tata ruang kegiatan ekonomi dan sosial yang membawa berbagai tekanan tak terelakan terhadap kebijaksanaan regional. Maka untuk dapat mengorganisasikan dengan baik diperlukan suatu teknik pendekatan guna mengetahui macam kegiatan berpotensi, karena kegiatan inilah yang akan memberi pengaruh besar bagi perkembangan daerah selanjutnya (Suwardjoko Warpani, 1984).

1. Metoda Analisis Location Quotient

Teknik analisa location quotient (LQ) merupakan cara permulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. Teknik ini tidak memberikan kesimpulan akhir , namun dalam tahap

pertama sudah cukup memberikan gambaran akan kemampuan daerah yang bersangkutan dalam sektor yang diamati.

Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghasilkan koefisien dapat menggunakan satuan jumlah buruh, atau hasil produksi atau satuan lainnya yang dapat digunakan sebagai kriteria.

Perbandingan relatif ini dapat dinyatakan secara matematika sebagai berikut:

$$LQ = \frac{S_{iR} / S_R}{S_{iN} / S_N}$$

Keterangan :

S_{iR} : jumlah PDRB sektor i pada daerah R

S_R : jumlah total PDRB pada daerah R

S_{iN} : jumlah PDB sektor i pada wilayah nasional

S_N : jumlah total PDB pada wilayah nasional

Analisis ini digunakan untuk mengetahui dan menentukan sektor ekonomi yang merupakan sektor basis dan yang non basis. Sektor basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hasil produksinya dapat untuk melayani pasar baik di dalam maupun di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya

mampu menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bertempat tinggal.

Perhitungan teknik ini sangat sederhana. Kesulitan utama terletak dalam menyederhanakan data ke dalam satuan yang sama. Kelemahan inilah antara lain yang menyebabkan kesimpulan yang dihasilkan belum bersifat final.

Struktur perumusan LQ memberikan beberapa penilaian sebagai berikut:

LQ > 1, atau LQ = 1, atau LQ < 1

Analisis dengan LQ ini merupakan alat sederhana untuk mengetahui apakah suatu daerah (atau sub daerah) sudah seimbang atau belum dalam kegiatan tertentu (misalnya industri), yang dapat dilihat dari besarnya angka LQ. Dengan kata lain, angka LQ memberikan indikasi sebagai berikut :

- (1) $LQ > 1$, menyatakan sub daerah bersangkutan mempunyai potensi ekspor dalam kegiatan tertentu.
- (2) $LQ < 1$, menunjukkan sub daerah bersangkutan mempunyai kecenderungan impor dari sub daerah/ daerah lain.
- (3) $LQ = 1$, memperlihatkan daerah yang bersangkutan telah mencukupi dalam kegiatan tertentu (seimbang) (Suwardjoko Warpani, Analisis Kota dan Daerah 1984)

Dengan kata lain salah satu indikator yang mampu menggambarkan keberadaan sektor basis adalah melalui indeks LQ (*location quotient*). LQ adalah suatu indikator sederhana yang dapat menunjukkan kekuatan

atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan daerah di atasnya. Dalam literatur perekonomian wilayah disebutkan bahwa suatu sektor yang memiliki angka LQ di atas satu maka sektor tersebut merupakan sektor basis yang menjadi kekuatan daerah untuk mengekspor produknya ke luar daerah bersangkutan. Sebaliknya jika LQ suatu sektor di bawah satu, maka sektor tersebut menjadi pengimpor.

2. Metoda Analisis Shift – Share

Ukuran pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menggambarkan hubungan antara ekonomi lokal dan lingkungan sekitarnya. teknik yang paling berguna memberikan langkah-langkah komparatif atau deskripsi status ekonomi lokal

Analisis Shift Share adalah teknik yang kuat dan berguna untuk menganalisis perubahan dalam struktur ekonomi lokal mengacu pada negara atau komunitas negara, yang diteliti bisa kecil atau besar asalkan terdapat dalam referensi ekonomi. ekonomi referensi dapat sekecil negara atau sebagai besar sebagai nation. Dalam arti kata merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingannya dengan daerah yang lebih besar (regional/nasional). Analisis ini memberikan data tentang kinerja perekonomian.

Tujuan SSA adalah untuk menentukan prestasi kerja atau produktivitas perekonomian lokal dibandingkan dengan basis yang lebih besar (wilayah, negara, atau bangsa). SSA memberikan data tentang kinerja perekonomian lokal di tiga bidang yang terkait

1. pertumbuhan ekonomi mengukur pertumbuhan ekonomi dalam hal jumlah tenaga kerja dalam perekonomian referensi antara dua periode.
2. pergeseran propotional mengukur laju pertumbuhan sektor individu sebagai comparel dengan laju pertumbuhan total ekonomi referensi. ukuran ini memungkinkan seseorang untuk memastikan apakah ada perubahan dalam ekonomi referensi
3. pergeseran ekonomi membantu dalam menentukan bagaimana industri lokal kompetitif dibandingkan dengan referensi ekonomi. mengukur laju pertumbuhan sektor industri lokal dibandingkan dengan yang ada pada industri yang sama dalam perekonomian referensi. sehingga pergeseran diferensial positif dalam industri tertentu menunjukkan bahwa tumbuh lebih cepat dari industri yang sama dalam perekonomian referensi (Edward J.Blakely, Planning Local Economic Development, 1994)

persyaratan data untuk analisis shift share yaitu memerlukan data dari dua referensi tahun untuk kedua ekonomi lokal dan ekonomi referensi.

Analisis Shift Share digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran dan peranan perekonomian di daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan cara menekankan pertumbuhan sektor di daerah, yang dibandingkan dengan

sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi atau nasional. Analisis tersebut dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya.

Potensi ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari kapasitas kemampuan pertumbuhan output/produksi jika dibandingkan dengan kapasitas perekonomian sekitarnya, misalnya saja perekonomian nasional. Setiap daerah seharusnya memiliki strategi pembangunan sektoral yang dapat berbeda sesuai dengan karakteristik daerah dan keunggulan komparatif yang dimiliki. Jika suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, berarti kapasitas pertumbuhan ekonomi belum tercapai secara optimal. Salah satu cara untuk mencapai kapasitas yang optimal yaitu dengan mendorong masuknya investasi di sektor yang menjadi prioritas pembangunan. Analisis *shift-share* merupakan salah satu model yang memiliki kelebihan dalam melihat pola pertumbuhan daerah dan besarnya angka pertumbuhan yang seharusnya dapat dicapai atau terjadi.

Analisis *shift-share* adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisa data statistik regional, baik berupa pendapatan per kapita, output, tenaga kerja maupun data lainnya. Dalam analisis ini, akan diperlihatkan bagaimana keadaan pertumbuhan di daerah dengan dibandingkan pada pertumbuhan nasional. Tujuan dari analisis *shift-*

share adalah untuk melihat dan menentukan kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkan dengan wilayah yang lebih luas (wilayah referensi). Dengan demikian, analisis ini akan memberikan hasil perhitungan yang dapat menentukan posisi, baik berupa kelemahan maupun kekuatan, dari suatu sektor-sektor dalam perekonomian di daerah dibandingkan dengan sektor-sektor yang sama di tingkatan wilayah referensinya.

Analisis *shift-share* tidak dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana proses perubahan di setiap sektor tersebut terjadi. Analisis ini hanya memberikan gambaran bagi para pengambil keputusan untuk menentukan mengapa suatu sektor tertentu dalam perekonomian memiliki kekuatan yang lebih baik dibandingkan dengan sektor yang sama di wilayah referensinya, dan sektor yang lainnya tidak.

Asumsi yang digunakan pada analisis *shift-share* adalah bahwasanya pertumbuhan perekonomian suatu daerah dapat dibagi menjadi tiga komponen, yaitu: (1) komponen pertumbuhan regional (*regional share*), yaitu pertumbuhan daerah dibandingkan dengan pertumbuhan nasional; (2) komponen pertumbuhan proporsional (*proportional shift*), yaitu perbedaan antara pertumbuhan daerah dengan menggunakan pertumbuhan nasional sektoral dengan pertumbuhan daerah dengan menggunakan pertumbuhan nasional total; dan (3) komponen pergeseran pertumbuhan diferensial (*differential shift*), yaitu perbedaan antara pertumbuhan daerah secara aktual dengan pertumbuhan daerah jika menggunakan pertumbuhan sektoral nasional.

Analisis shift share membutuhkan pekerjaan data dari dua referensi tahun untuk kedua ekonomi lokal dan ekonomi referensi. Data ini tersedia dari berbagai sumber. sumber yang paling banyak tersedia untuk informasi ini adalah pula bisnis di ekonomi lokal. informasi harus dikembangkan oleh kode industri standar untuk masing-masing sektor atau subsektor di bawah analisis.

Berdasarkan asumsi di atas, maka dibuat perumusan *shift-share* secara kuantitatif, yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Employment changes in local industriy } i \text{ 1980-1990} = & \\ \{ref90/ref80-1\} + \{emp90 i/emp80i- ref90/ref80\} + & \\ \text{(economic growth)} \quad \text{(proportional shift)} & \\ \{loc90i/local80i- emp90i/emp80i\} & \\ \text{(differential shift)} & \end{aligned}$$

dimana:

Employment changes in local industry i 1980-1990

= Perubahan total di daerah

R = *Regional share*

S_p = *Proporsional shift*

S_d = *Differential shift*

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh *regional share*, *proportional shift*, dan *differential shift*. *Regional share* suatu daerah diukur dengan cara menganalisis perubahan agregat secara sektoral di daerah dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian wilayah referensinya (dalam hal ini nasional). Jika suatu wilayah tumbuh dengan tingkat yang sama dengan pertumbuhan nasionalnya maka wilayah daerah tersebut akan mempertahankan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. *Proportional shift* mengukur perubahan relatif,

tumbuh lebih cepat atau lebih lambat, suatu sektor di daerah dibandingkan dengan perekonomian wilayah referensinya (nasional). Pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan perekonomian nasionalnya. Pertumbuhan sektoral yang berbeda dengan nasionalnya bisa disebabkan karena komposisi awal ekonominya yang dikaitkan dengan bauran sektoralnya (*component mix*). Sedangkan differential shift membantu dalam menentukan seberapa jauh daya saing sektoral suatu daerah dibandingkan dengan perekonomian yang dijadikan referensi (nasional). Oleh sebab itu, jika differential shift dari suatu sektor bernilai positif, maka sektor tersebut memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada perekonomian nasional, dan sebaliknya. Komponen ini biasanya dikaitkan dengan adanya keunggulan atau ketidakunggulan kompetitif suatu daerah dibandingkan dengan wilayah nasional. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya lingkungan sekitar yang kondusif atau tidak kondusif terutama dalam mendukung pertumbuhan setiap sektoralnya (Edward J. Blakely, *Planning Local Economic Development*, 1994).

3. Analisis Jaringan Jalan

Analisis kondisi jaringan jalan dilihat dengan melakukan survey lapangan melihat kondisi jalan di 8 (delapan) kecamatan di Kabupaten Pringsewu dan juga meninjau dari peraturan yang ada.ayar

Analisis kondisi jaringan jalan dilakukan untuk melihat sudah cukup layakkah kondisi yang ada untuk mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten pringsewu, hal ini dikarenakan jaringan jalan merupakan nadi bagi pengembangan suatu wilayah.

Berikut ditampilkan tabel mengenai persyaratan teknis jaringan jalan primer dan sekunder.

**Tabel 3 Persyaratan Teknis Jaringan Jalan Primer
(Pp No. 34/2006 Ps. 13 - 16)**

No.	Fungsi Jalan	Persyaratan Teknis
1.	Arteri Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. 2. Mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. 3. Pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal. 4. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus tetap terpenuhi. 5. Persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 6. Jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. 7. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
2.	Kolektor Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. 2. Mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. 3. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masih tetap terpenuhi. 4. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 5. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.

3.	Lokal Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter. 2. Jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus.
4.	Lingkungan Primer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. 2. Persyaratan teknis jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih. 3. Jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda tiga atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.

Tabel 4 Persyaratan Teknis Jaringan Jalan Sekunder (Pp No. 34/2006 Ps. 17 - 20)

No.	Fungsi Jalan	Persyaratan Teknis
1.	Arteri Sekunder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter. 2. Mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. 3. Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. \ 4. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
2.	Kolektor Sekunder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. 2. Mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. 3. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. 4. Persimpangan sebidang pada jalan arteri sekunder dengan pengaturan tertentu harus dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
3.	Lokal Sekunder	Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.

4.	Lingkungan Sekunder	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter. 2. Persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih. 3. Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
----	---------------------	---

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006